

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang merupakan kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat, jika di hubungkan dengan Ideologi Liberalisme yaitu Kebebasan yang merupakan persamaan menjunjung kedaulatan Rakyat dan Kepentingan rakyat ada di tangan rakyat tanpa harus ada tindakan dari para pemerintah dan lainnya.

Kata demokrasi biasa digunakan pada sistem pemerintahan. Demokrasi adalah negara yang menjalankan kekuasaan tertinggi dalam lingkup masyarakat. Warga negara berpartisipasi dalam semua keputusan kebijakan pemerintah. Assegaf (2004) mengatakan: Kata-kata yang mendefinisikan demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, hal yang sama diungkapkan oleh Soche (Winarno, 2010)

Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat dimana rakyat sebagai penguasa. Sehingga masyarakat terorganisir, mampu melindungi dirinya sendiri dan mengamankan dirinya dari ajakan pihak lain. Demokrasi di Indonesia adalah proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari pemahaman dan pengertian demokrasi oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia dan para founding fathers, khususnya Soekarno, Mohammad Hatta dan Suetan Shahril. Selanjutnya, proses ini juga menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari kemerdekaan Indonesia, berdirinya Amerika Serikat di Indonesia, hingga munculnya tahapan kediktatoran Sukarno pada Orde Lama dan Suharto pada Orde Baru. Proses penguatan demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini.

Bentuk demokrasi dalam arti “tata cara pembentukan pemerintahan secara umum” adalah pemilihan umum (pemilu). Dengan kata lain, pemilu merupakan manifestasi penting dari "demokrasi prosedural". Dalam hal ini, Samuel P. Huntington, dalam bukunya *Gelombang Demokrasi Ketiga*, berpendapat bahwa proses utama demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara kompetitif oleh mereka yang memimpin mereka.

Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang dirancang dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik untuk menghindari perilaku monarki yang bersifat otoriter. Namun demikian mekanisme pemilu hanya mungkin jika ia dipengaruhi oleh prakondisi yang mungkin seperti modernitas dan kesejahteraan, budaya politik dan struktur sosial masyarakat. Mengikuti pendapat Rose dan Mssawir, fungsi pemilu pada dasarnya untuk menentukan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintahan, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Secara umum sistem pemilu dikenal dan di praktikan di banyak negara antara lain distrik dengan sejumlah variannya, sistem proporsional dengan variannya, sistem campuran dan sistem lain yang mengalami perkembangan dewasa ini. Bagaimanapun sistem pemilu mengidap kelebihan dan kelemahannya, semua bergantung pada konteks dan prakondisi masyarakat yang akan menerapkannya. Ia membutuhkan sejumlah persyaratan pemilu yang jujur.

Berdasarkan uraian diatas, Pemilu adalah praktik institusional dan prosedural politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memungkinkan pembentukan pemerintahan perwakilan. Ini, menurut Robert Dahl, adalah gambaran ideal dan terbesar

dari pemerintahan demokratis pada zamannya.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan dengan karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pondok pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, bina lingkungan, dan pendidikan sejenis lainnya. Santri pondok pesantren disebut Santri dan biasanya tinggal di pondok pesantren. Pesantren adalah tempat santri tinggal di lingkungan pesantrennya yang disebut ponok. Oleh karena itu istilah pondok pesantren, sebagai pondok pesantren adalah subkultur pendidikan Indonesia, akan memberikan warna yang unik dalam menghadapi pembaharuan, dari beberapa pendapat di atas, pandangan karakter pondok pesantren Tidak ada perbedaan Sekolah adalah sekolah sebagai tempat pendidikan agama Islam yang bercirikan mengaji kitab kuning dan mengaji syariat dan ilmu agama, pondok pesantren adalah sekolah ilmu agama islam yang selanjutnya dideskripsikan sebagai tempat belajar.

Pesantren memiliki tujuan keagamaan yang sesuai dengan kepribadian pendirinya. Sejauh mana kualitas ilmu Kiai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh metode pengajaran dan kitab-kitab yang diajarkan kepada santri. Kiai pun sudah tentu akan mengajar dan memberikan pengetahuan-pengetahuan untuk santri kembangkan dalam dirinya masing-masing.

Pesantren mengikuti ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi, saling menghormati, kerja sama, persamaan hukum, memastikan keadilan sebagai negara hukum Indonesia, dan menjadi negara hukum. Ini juga merupakan tempat untuk menanamkan rasa nilai. di salah satu pesantren di Indonesia. Para pengurus pesantren Indonesia telah belajar berpikir

rasional untuk mengembangkan dan memajukan pesantren, dan banyak pemimpin yang telah menanamkan nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan sehari-hari para santrinya. Namun, mewujudkan pesantren yang demokratis untuk hak pilih universal, dengan tujuan menjadikan rakyat sebagai penentu pemilihan kepala negara dan pemilihan lainnya, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang sebenarnya.

Ibarat sebuah negara, pesantren adalah organisasi kecil yang mirip masyarakat dengan warga negara dan aturan. Pesantren adalah sebuah organisasi, unit sosial, yang secara sadar dibentuk oleh banyak orang yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya untuk mendidik dan mendewasakan anak agar mandiri secara mental, psikologis, biologis dan sosial. Menurut Sparno (2004: 57). Pendidikan demokrasi lebih mengutamakan pada pengembangan keterampilan intelektual, diri sendiri dan khalayak umum.

Sebagai lembaga pendidikan yang berumur sangat tua ini, pesantren dikenal sebagai media pendidikan yang menampung seluruh jenis strata masyarakat. Fakta sejarah membuktikan, betapa kalangan pesantren sangat intensif melakukan perlawanan terhadap segala perilaku budaya dan ideologi maupun politik yang di khawatirkan akan merongrong ideology yang mereka yakini. sebut saja seperti pendiri Nahdlatul Ulama yang di motori oleh orang-orang pesantren. Sikap ini juga ditunjukkan dengan pertentangan orang-orang pesantren vis a vis gerakan komunis.

Dari pemaparan diatas, penulis analisis bahwa pesantren/santri memiliki hubungan yang cukup erat dengan masyarakat sekelilingnya. Bahkan tradisi yang berlaku di dunia pesantren ini pun berlaku dalam dunia luar pesantren. Hal ini dapat terjadi dengan undangan dari masyarakat kepada kiai untuk menghadiri acara tertentu ataupun sebaliknya

pihak pesantren yang mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara tertentu yang diadakan oleh pesantren.

Pesantren Al-Ihsan merupakan lembaga pendidikan sekaligus sarana perjuangan. Sebagai lembaga pendidikan, Al-ihsan merupakan pusat pendidikan dan pendidikan. Santri dan Ustadz sekaligus memainkan dua peran. belajar dan mengajar. Siswa dapat belajar untuk memperoleh pengetahuan, atau mereka dapat "menyerahkan" pengetahuan mereka kepada orang lain. Tugas Ustar adalah mengajar, tetapi pada saat yang sama, atau setidaknya pada kesempatan lain, mereka juga belajar. Hal ini sesuai dengan pesan kenabian man'allama 'ilman'allamah Allah malam ya'lam. Singkat kata, bagi santri dan ustaz Al-Ihsan, tiada arti tanpa kegiatan pendidikan.

Sebagai wahana perjuangan, Al-Ihsan menyediakan lahan subur bagi setiap muslim (santri, ustadz, dan siapa saja) untuk berjuang. Sesungguhnya pada tingkat paling rendah, perjuangan tersebut tak lain adalah setiap kerja keras untuk kepentingan diri sendiri. Pada tingkat kedua, perjuangan dimaksud adalah untuk mengembangkan pesantren.

Pondok pesantren Al-Ihsan yang tata geografisnya tidak jauh dari perguruan tinggi, diantaranya dekat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan Universitas Pendidikan Indonesia Cibiru, ini menjadikan pesantren jadi Sasaran utama para mahasiswa untuk belajar dan mengaji. Dengan demikian, dari adanya mahasiswa sistem kepengurusan santri di pesantren Al-Ihsan ini sedikit berbeda.

OSPAI (Organisasi Santri Pesantren Al-Ihsan) adalah organisasi terbesar (terpusat) dari Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, mendukung implementasi visi dan misi Pesantren dan memenuhi kebutuhan santri yang berbeda-beda. OSPAI juga bertindak sebagai

perantara dalam kebutuhan pendidikan, kesejahteraan, pengembangan bakat, dan lain sebagainya yang bersangkutan di pesantren.

OSPAI berdiri sejak bulan September 1995 yang menjadi ketua saat itu adalah E. Kusdian. OSPAI menganut sistem organisasi presidensial hingga saat ini dengan ciri-ciri Presiden sebagai ketua santri. Seiring dengan berkembangnya zaman maka keperluan unit SDM pengurus pun menjadi lebih kompleks dan banyak. Sistem OSPAI pada tahun 2020-2021 masih menganut sistem Presidensial dengan nama Kabinet Al-Istiqomah yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris OSPAI kemudian menaungi kementerian, diantaranya Kementerian Pendidikan (KEMENDIK), Kementerian Agama (KEMENAG), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Luar Negeri (KEMENLU), Kementerian Kesejahteraan (KEMENKESTRA), Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Pertahanan dan Keamanan (KEMENHANKAM), Kementerian Pemuda Olahraga (KEMENPORA), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO). Selain itu juga OSPAI menjadi penanggung jawab bagi Pengurus Asrama (Ospai Wilayah) dan UKS (Unit Kegiatan Santri).

Dengan adanya OSPAI di Pesantren Al-Ihsan yang merupakan salah satu tangan Panjang dari Pemimpin Pondok Pesantren Al-Ihsan diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan administrasi, structural, Kinerja Pengurus, dan kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam sistem politik dan mengaplikasikan pengetahuan proses politik sesuai apa yang telah santri pahami di kampus perkuliahan.

Begitupun Presiden yang terpilih, Calon Presiden sudah tentu menang dalam pemilihan karena ada beberapa faktor yang mendorong. Menang karena strategi yang disiapkannya, atau dari kapabilitas Calon Presiden yang mempunyai kapabilitas yang

bagus ataukah dari etnisitas yang banyak sesuai Calon Presiden tinggal.

Seperti halnya Presiden OSPAI periode sebelumnya pada periode 2022-2023, Presiden OSPAI berasal dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kampus tempat belajarnya, sama halnya Calon Wakil presidennya pun mempunyai latar belakang organisasi yang layak. Kemudian dari adanya latar belakang tersebut, Presiden dan wakil presiden bisa memenangkan pemilihan ini.

Namun keadaan yang terjadi di lapangan OSPAI sekarang, pemenangan Presiden OSPAI sedikit berbeda dari sebelumnya. Terhitung calon presiden dan wakil presiden periode 2022-2023 tidak memiliki atau tidak mengikuti organisasi tertentu di kampus ataupun diluar kampusnya. Latar belakang yang dilihat oleh penulis yang menjadi pertanyaan mengapa mereka memenangkan pemilihan tahun ini. Adapun pemilih presiden yang berasal dari santri mempunyai penilaian latar belakang organisasi ataukah ada faktor lain yang membuat Calon Presiden dan wakil Presiden ini terpilih.

Menjadi hal menarik, upaya apa yang dilakukan calon Presiden dan wakil Presiden OSPAI dalam mensukseskan kemenangan dan mengoptimalkan kepengurusan serta menerapkan dinamika politik di kepengurusan dan kinerja apa saja yang telah dilakukan Pengurus OSPAI terhadap santri. Kemudian apakah hirarki Pengurus OSPAI sama dengan hirarki yang ada di pemerintahan suatu negara.

Dari hasil survey serta penelitian penulis, OSPAI yang sudah ada sejak tahun 1995 memiliki metode dan sistem kepemimpinan OSPAI yang berbeda-beda. Begitupun pemenangan Presiden dari tahun berbeda-beda dalam hal yang mendorongnya menang menjadi presiden OSPAI. Apabila dinamika OSPAI dapat berjalan secara optimal tentu akan membantu Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan dalam memberikan sosialisasi,

edukasi, mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan politik di Pesantren Al-Ihsan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana keterlibatan santri dalam Pemilihan Raya Santri (PRS) dan pemenangan presiden OSPAI dalam mengatur startegi secara langsung diimplementasikan di Pemilihan Raya Santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir. Untuk itu penulis mengambil judul **“Dinamika Politik Santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi (Study Kasus Pemenangan Pemilihan Raya Santri (PRS))”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa teridentifikasi masalah seperti berikut:

- a. Santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dominan dengan mahasiswa dan sudah tentu mengetahui dinamika politik Pondok Pesantren Al-Ihsan dan sering mempraktikan dinamika politik, namun karena lingkungan islami yang menghambat santri untuk meramaikan dinamika politik semakin panas.
- b. Dengan adanya OSPAI sebagai tangan Panjang dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir tersebut belum optimal dalam mengajak dan merangkul santri agar sadar dalam menerapkan dinamika politik di Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir.
- c. Masih tabu nya sistem kepengurusan OSPAI yang dimaknai atau dikenal sebagai organisasi plagiasi pemerintahan negara.

1.3 Rumusan Masalah

Dinamika politik di Pondok pesantren Al-Ihsan melekat dan banyak dipraktikan di kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren Al-Ihsan yang dikenal dengan struktur organisasinya sebagai miniatur negara, itu ditandakan dengan adanya kekuasaan Presiden dan para Menteri. Hal itu yang kemudian menjadi kesuksesan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan dalam memberikan dorongan dan nasihat agar santri Al-Ihsan bisa menerapkan Proses Politik di kepengurusan Organisasi Santri Pengurus Al-Ihsan (OSPAI). Namun demikian, kesuksesan ini tidak lepas dari kemenangan presiden yang jadi pengurus OSPAI ketika adanya Pemilihan Raya Santri. Dengan demikian pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah ;

1. Apakah hirarki yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan sama dengan hirarki yang ada di pemerintahan Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mendukung kemenangan presiden OSPAI di Pondok Pesantren Al-Ihsan?
3. Bagaimana pengurus OSPAI mempertahankan dinamika politik yang terjadi di Pondok Pesantren?

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis sudah seharusnya memiliki tujuan yang jelas agar bisa meningkatkan wawasan keilmuan pada objek yang diteliti, hal tersebut serupa dengan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah
2. Untuk mengetahui dinamika Pengurus OSPAI dalam menjalankan kepengurusannya

3. Untuk mengetahui apakah ada kesamaan dalam Pengurus OSPAI dengan pemerintah negara

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan untuk melakukan penelitian ini, salah satu dari harapannya adalah dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi pemangku kepentingan.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapan mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya di ranah Ilmu Politik.

Hasil riset ini semoga bisa menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika serta menjadi pedoman untuk peneliti lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu peneliti mempraktekkan ilmu yang diperolehnya dalam pelatihan, meningkatkan kemampuan intelektual dan memperluas wawasan..

b. Untuk Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan agar instansi terkait, dan dapat konsisten menjaganya

dalam segala bentuk strategi dan bentuk kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah/Lembaga, pihak swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk menambah kesadaran Santri dalam pentingnya menanamkan proses politik di Pesantren yang dominan santrinya ialah mahasiswa.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan pemahaman untuk masyarakat khususnya yang beragama islam dalam menambah kesadarannya dalam menerapkan proses-proses politik di Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir.

1.6 Kerangka Pemikiran

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ بِيَتَعُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا هُنُوَ إِلَىٰ أَرْشَادِ أُمُورِهِمْ

“Tidak ada konsultasi bagi orang. Mereka mencari nasihat dengan ridha Allah kecuali mereka diperkenalkan kepada orang yang paling cocok dengan urusan mereka.” (Majmu’atul Hadis ‘An-Najdiyah 182)

Hadis ini menunjukkan ketika memilih seorang pemimpin itu dengan melakukan musyawarah karena sistem demokrasi selain dari bebas mengemukakan pendapat yakni musyawarah yang di dalamnya mengikut sertakan rakyat untuk menemukan kesepakatan bersama.

Sesuai dengan hadits diatas, peneliti mengambil teori islam dengan cara menyamakan antara hadits dan pengertian politik menurut para ahli. Politik yang sifatnya dari, untuk, dan oleh rakyat. Yang mana rakyat memiliki hak suara dalam pemilihan umum

(pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), kekuasaan dan ketentuan adanya pemerintahan itu adanya partisipasi dari rakyat.

Begitupun di pondok pesantren Al-ihsan yang berbasis mahasiswa adanya Pengurus OSPAI yang mencakup adanya Presiden dan jajaran para menteri itu berawal dari partisipasi santri melalui PRS (Pemilu Raya Santri) yang dilakukan setelah kepengurusan satu periode dengan masa waktu satu tahun.

Oleh karena itu hubungannya dengan Ilmu Politik adanya proses politik di pesantren ini adalah suatu strategi pimpinan pondok pesantren untuk mengikut sertakan berbagai santri yang berasal dari manapun secara langsung untuk membuat Pondok Pesantren Al-ihsan lebih modern.

Selanjutnya, untuk meneliti bagaimana terlibatnya santri (mahasiswa) dalam menambah kesadaran berdemokrasi dalam menentukan ketua dari pengurus OSPAI dengan adanya Pemilu Raya Santri (PRS), peneliti menggunakan Teori Pendekatan Kepribadian Thomas Ricono yang menggambarkan proses pembentukan karakter manusia melalui pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral.

Menurut Thomas Lickona, kepribadian ini berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik didasarkan pada mengerti dalam hal kebaikan, keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan berbuat baik.

1.6.1 Strategi pemenangan Pemilu

Berikut pilihan strategi yang dapat dilakukan (Pito, 2006): Sesuai konsep yang di pakai dalam strategi penguatan (*Reinforcement strategy*) Strategi ini dikatakan strategi penguatan karena dapat dipakai untuk *positioning* kepada masyarakat yang sudah

mengetahui akan citra positif dari Capres dan Cawapres, dan masyarakat akan memilih pasangan ini, karena mereka juga mengetahui kinerja dari Capres-Cawapres sebelumnya, yang dapat menguatkan pilihan mereka terhadap pasangan tersebut. tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya dalam mempertahankan suara pemilih.

Strategi kedua adalah strategi rasionalisasi (*Rationalization strategy*), strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan matang, karena strategi ini digunakan untuk mereka (pemilih) yang sebenarnya telah mengetahui citra positif atau karakteristik unik dari pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden. namun pemilih ini merasa citra tersebut belum sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pasangan calon yaitu Jokowi-Ma'ruf. Pada strategi ini bagaimana pasangan calon memberikan janji politik yang rasional yang sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat dibedakan dari pasangan calon lawan dan bagaimana pasangan calon dapat membangun konsensus dan berkompromi dari permasalahan atau isu yang ada. Dari strategi rasionalisasi (*Rationalization strategy*), pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki strategi dari segi janji politik, Dukungan data yang cukup, mempermudah jalan mereka untuk mencanangkan "Perbaikan" secara citra kinerja di masyarakat dari apa yang sudah dilakukan.

Selanjutnya strategi bujukan (*Inducement Strategy*), dimana citra Calon Presiden dan Wakil Presiden masih diragukan atau tidak cocok dengan persepsi pemilih, walau pemilih mengetahui kinerja dari pasangan tersebut cukup baik, dengan itu pada strategi ini ingin dilihat pendekatan apa yang dipakai pasangan calon dalam memperbaiki citra, seperti mencari cara citra positif yang seperti apa yang membedakan citra Calon Presiden dan wakil Presiden dari citra pasangan calon lain, dapat dilihat juga sejauh manapadangan calon

dapat memahami kahlayak, dengan observasi atau penelitian. Dalam hal ini tim sukses melakukan cara yang ditempuh terutama adalah melalui saluran media sosial. Bahan dasar yang *viral* melalui media sosial adalah pesan-pesan yang disampaikan Calon Presiden dan Wakil presiden dalam perjumpaan langsung dengan masyarakat atau calon pemilih, melalui media sosial tersebut.

1.6.2 Pemilihan Raya Santri (PRS) dalam OSPAI

Pemilihan Raya Santri adalah pemilihan ketua santri atau jika di Pondok Pesantren Al-Ihsan dinamai dengan Presiden. Presiden ini yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan kementerian, dan sebagai koordinator dengan pimpinan Pondok Pesantren serta keluarga, dewan guru dan pihak lain (external).

Kemudian Pemilu raya Santri yang selanjutnya disingkat Panitia (PPRS) dibentuk oleh OSPAI (Organisasi Pesantren Al-Ihsan) dan dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang mana panitia PRS ini bertugas; mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan PRS, melaksanakan pemungutan suara secara luberjurdil (langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil), juga mensosialisaikan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden. Kegiatan PRS ini akan menghasilkan Presiden dan wakil presiden setelah pemungutan suara dan perhitungan suara. Dari hasil perhitungan suara inilah, Calon Presiden dan wakil Presiden ditentukan.

Seperti halnya di pemerintahan, adanya Presiden Wakil presiden ini ditentukan dari suara rakyat. Di Pondok Pesantren Al-Ihsan pun sistem pemilihan ketua santri

menyerupai sistem pemilihan umum yang ada. Melalui pencalonan, kampanye dan terakhir pemilihan dan perhitungan suara.

Dalam ketentuan Pemilihan raya Santri juga terdapat Panitia Pengawas Pemilu (PPS) yang mana ini mengawasi keberlangsungan pemilu. Tata tertib pemilihan untuk mengamankan dan mentertibkan aturan yang sudah dibuat oleh panitia. Kampanye dari Calon Presiden wakil Presiden dalam waktu serta bentuk dan isi kampanye sesuai yang ditentukan oleh panitia. Kompromi jika ada dua calon atau lebih mendapatkan jumlah suar yang sama, maka para calon yang bersangkutan akan diadakan pemilihan putaran kedua.

